

ABSTRAK

Dalam rang tertib penyelenggaraan Pemerintahan Aceh yang lebih baik maka diperlukan Qanun yang merupakan peraturan daerah yang khas dan dalam hal tertentu berbeda dengan peraturan daerah pada umumnya.

Pembentukan Qanun sebagai instrument yuridis untuk pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh dan peraturan Perundang-undangan lain serta pelaksanaan otonomi daerah akan terlaksana dengan baik, apabila didukung oleh tatacara pembentukan, metode yang pasti, baku dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membentuk Qanun.